



## TINDAK PIDANA EKONOMI DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM

### *CRIMINAL ECONOMY IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN LAW ENFORCEMENT*

**Tota Roganda Siahaan<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Universitas Bung Karno

Email: totasiahaan26@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

#### Article history :

Received : 12-01-2025

Revised : 13-01-2025

Accepted: 15-01-2025

Published: 18-01-2025

#### Abstract

*Economic crimes in the digital era are increasingly complex and challenging issues, especially with the development of information technology that facilitates various forms of crime such as online fraud, embezzlement, and money laundering. This study aims to analyze the characteristics and challenges faced in law enforcement against digital economic crimes, and to formulate effective solutions to overcome these problems. With an in-depth qualitative approach, this study identifies various forms of economic crimes that have emerged due to technological advances, regulatory challenges that have not been fully able to accommodate these developments, and the importance of educating the public in understanding the risks and impacts of economic crimes. The results of the study indicate that a deep understanding of this phenomenon is very important for formulating responsive law enforcement policies and strategies to the development of the times, so as to create a safer environment for the community. Thus, this study is expected to provide a significant contribution to the development of more adaptive and effective legal policies in facing challenges in the digital era.*

**Keywords: Economic Crimes, Digital Era, Law Enforcement.**

#### Abstrak

Tindak Pidana Ekonomi Di Era Digital Merupakan Isu Yang Semakin Kompleks Dan Menantang, Terutama Dengan Berkembangnya Teknologi Informasi Yang Memfasilitasi Berbagai Bentuk Kejahatan Seperti Penipuan Online, Penggelapan, Dan Pencucian Uang. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Karakteristik Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Digital, Serta Merumuskan Solusi Yang Efektif Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut. Dengan Pendekatan Kualitatif Yang Mendalam, Penelitian Ini Mengidentifikasi Berbagai Bentuk Tindak Pidana Ekonomi Yang Muncul Akibat Kemajuan Teknologi, Tantangan Regulasi Yang Belum Sepenuhnya Mampu Mengakomodasi Perkembangan Tersebut, Serta Pentingnya Edukasi Masyarakat Dalam Memahami Risiko Dan Dampak Dari Kejahatan Ekonomi. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pemahaman Yang Mendalam Tentang Fenomena Ini Sangat Penting Untuk Merumuskan Kebijakan Dan Strategi Penegakan Hukum Yang Responsif Terhadap Perkembangan Zaman, Sehingga Dapat Menciptakan Lingkungan Yang Lebih Aman Bagi Masyarakat. Dengan Demikian, Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Signifikan Dalam Pengembangan Kebijakan Hukum Yang Lebih Adaptif Dan Efektif Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Ekonomi, Era Digital, Penegakan Hukum.**

#### PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi



informasi yang pesat, bentuk-bentuk kejahatan ekonomi semakin beragam dan kompleks. Tindak pidana ekonomi mencakup berbagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah, seperti penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan korupsi. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu atau perusahaan, tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian negara secara keseluruhan. Kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana ekonomi dapat mengganggu stabilitas pasar, mengurangi kepercayaan investor, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai fenomena ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang efektif (Septianingrum Dkk, 2024).

Di era digital, banyak transaksi ekonomi yang dilakukan secara online, yang membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana ekonomi dengan cara yang lebih canggih. Misalnya, penipuan online, penggelapan, dan pencucian uang melalui platform digital semakin marak terjadi. Dengan kemudahan akses informasi dan teknologi, pelaku kejahatan dapat dengan mudah menyembunyikan jejak mereka, sehingga menyulitkan pihak berwenang dalam mendeteksi dan menangani kejahatan tersebut. Selain itu, banyak individu dan pelaku usaha yang masih kurang memahami risiko yang terkait dengan transaksi online, sehingga mereka menjadi korban. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk beradaptasi dan mengembangkan metode baru dalam mendeteksi dan menangani kejahatan tersebut. Tanpa adanya penyesuaian dalam pendekatan hukum, upaya penegakan hukum akan menjadi semakin sulit dan tidak efektif.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak dari kejahatan ini. Banyak individu dan pelaku usaha yang masih kurang waspada terhadap modus-modus penipuan yang berkembang, sehingga mereka menjadi korban. Edukasi dan sosialisasi mengenai tindak pidana ekonomi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih paham dan dapat melindungi diri mereka dari potensi kerugian. Program-program edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, komunitas, dan media, harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pidana ekonomi. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang (Rayhan, 2024).

Selain itu, sistem hukum yang ada juga sering kali tidak cukup responsif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi baru dalam tindak pidana ekonomi. Banyak regulasi yang belum diperbarui untuk mencakup aspek-aspek baru yang muncul akibat digitalisasi. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi masih perlu disempurnakan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta untuk memperbarui dan memperkuat regulasi yang ada. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks ini, peran Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga harus mampu memberikan putusan yang adil dan tepat waktu. Keputusan yang diambil oleh pengadilan akan



menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, kualitas dan integritas proses peradilan harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap tinggi. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ekonomi juga sangat diperlukan. Dengan demikian, diharapkan proses peradilan dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Tindak pidana ekonomi juga memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian negara. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak hanya dirasakan oleh individu atau perusahaan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, penggelapan pajak dan korupsi dapat mengurangi pendapatan negara, yang pada gilirannya berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, kejahatan ekonomi dapat menciptakan ketidakadilan sosial, di mana pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan yang tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu, penanganan yang serius terhadap tindak pidana ekonomi sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan ekonomi nasional dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, penting untuk mengembangkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan transparan bagi kegiatan ekonomi. Kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam memerangi tindak pidana ekonomi, mengingat banyak kejahatan yang bersifat lintas negara. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh (Ningrum, 2022).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi diri dari tindak pidana ekonomi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dan penerapan solusi yang tepat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari tindak pidana ekonomi dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih efisien.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi yang muncul di era digital, dan bagaimana karakteristiknya berbeda dari tindak pidana ekonomi konvensional?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana ekonomi di era digital?
3. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital?



## **Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi yang muncul di era digital.
2. Menganalisis tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana ekonomi di era digital.
3. Menyusun rekomendasi solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena tindak pidana ekonomi di era digital, serta memahami konteks sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi praktik-praktik tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui analisis dokumen dan studi literatur. Analisis dokumen akan dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus tindak pidana ekonomi yang terjadi di Indonesia, serta regulasi yang mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan data. Selain itu, peneliti juga akan meneliti laporan-laporan penelitian sebelumnya, artikel jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital.

Data yang diperoleh dari analisis dokumen dan studi literatur akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari dokumen yang telah dikaji. Proses analisis ini akan melibatkan pengkodean data untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Hasil analisis akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan transaksi digital. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ekonomi Yang Muncul Di Era Digital, dan Karakteristiknya Berbeda Dari Tindak Pidana Ekonomi Konvensional**

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, definisi tindak pidana ekonomi telah mengalami transformasi yang signifikan. Tindak pidana ekonomi di era digital merujuk pada berbagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah. Berbeda dengan tindak pidana ekonomi konvensional yang sering kali melibatkan transaksi fisik dan interaksi langsung, kejahatan di dunia maya dapat dilakukan secara anonim dan tanpa batasan geografis. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pid.Sus/2021, pengadilan harus mempertimbangkan karakteristik unik dari tindak pidana ekonomi digital saat memutuskan perkara, termasuk dalam hal pembuktian dan penjatuhan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang definisi dan



konteks tindak pidana ekonomi digital sangat penting bagi penegakan hukum yang efektif, terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menuntut pelaku kejahatan yang beroperasi di ranah digital.

Terdapat berbagai jenis tindak pidana ekonomi yang muncul di era digital, yang masing-masing memiliki modus operandi yang berbeda. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penipuan online, yang mencakup praktik seperti phishing, di mana pelaku mencoba mencuri informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas tepercaya. Penipuan ini sering kali dilakukan melalui email atau situs web palsu yang dirancang untuk menipu korban agar memberikan data sensitif, seperti nomor kartu kredit atau kata sandi. Selain itu, skimming, yang melibatkan pencurian data kartu kredit melalui perangkat ilegal, juga semakin marak. Jenis lain yang perlu diperhatikan adalah pencucian uang melalui platform digital, di mana pelaku menggunakan transaksi online untuk menyembunyikan asal usul dana ilegal. Penipuan investasi dan skema Ponzi juga menjadi masalah serius, di mana pelaku menjanjikan keuntungan tinggi kepada investor dengan menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama. Dalam putusan yang dibahas, Terdakwa Prima Hendika terlibat dalam usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida, yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi digital yang merugikan banyak orang dan menunjukkan bagaimana kejahatan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi (Jeryawan, 2024).

Karakteristik tindak pidana ekonomi digital sangat berbeda dari kejahatan konvensional, yang membuatnya lebih sulit untuk ditangani. Salah satu karakteristik utama adalah anonimitas yang diberikan oleh internet, yang menyulitkan pihak berwenang dalam melacak pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku dapat menggunakan identitas palsu dan alamat IP yang dapat dengan mudah disembunyikan, sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Kecepatan dan volume transaksi yang tinggi dalam dunia digital memungkinkan pelaku untuk melakukan kejahatan dalam skala besar dalam waktu singkat. Penggunaan teknologi canggih, seperti enkripsi dan jaringan anonim, juga memberikan perlindungan tambahan bagi pelaku, membuat mereka semakin sulit untuk ditangkap. Dalam putusan Mahkamah Agung, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini saat mengevaluasi bukti dan menentukan hukuman yang tepat, agar keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan.

Dampak dari tindak pidana ekonomi digital juga lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu atau perusahaan yang menjadi korban, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, penipuan investasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan lembaga keuangan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pencucian uang yang dilakukan melalui platform digital dapat mengganggu integritas sistem keuangan. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana ekonomi digital harus menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan sanksi, agar hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Pengadilan harus mempertimbangkan tidak hanya kerugian finansial yang dialami oleh korban, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan ekonomi.



Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami dengan baik bentuk-bentuk dan karakteristik tindak pidana ekonomi di era digital. Pengetahuan yang mendalam mengenai modus operandi pelaku kejahatan digital akan membantu dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun internasional, sangat diperlukan untuk mengatasi kejahatan lintas negara yang sering kali melibatkan pelaku dari berbagai yurisdiksi. Dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan juga harus mempertimbangkan kerjasama antar lembaga dalam proses penyelidikan dan penuntutan, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi dan teknologi antara lembaga penegak hukum, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kejahatan digital.

Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam upaya memerangi tindak pidana ekonomi digital. Masyarakat yang lebih sadar akan risiko dan modus operandi kejahatan digital akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Program-program edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, komunitas, dan media, harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pidana ekonomi. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, pengadilan dapat mendorong inisiatif edukasi sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi diri mereka dari potensi kerugian. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan mereka dapat mengenali tanda-tanda penipuan dan melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi yang muncul di era digital menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Dengan memahami perbedaan antara tindak pidana ekonomi digital dan konvensional, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Putusan-putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung harus mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kejahatan ekonomi di era digital, sehingga dapat memberikan keadilan yang seimbang dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Penegakan hukum yang efektif dalam konteks ini tidak hanya bergantung pada sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan terlindungi dari tindak pidana ekonomi (Akbar Dkk, 2024).

### **Tantangan Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Ekonomi Di Era Digital**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana ekonomi di era digital adalah keterbatasan regulasi dan kebijakan yang ada. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi, banyak dari regulasi tersebut yang belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi masih perlu disempurnakan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pid.Sus/2021, pengadilan harus menghadapi celah hukum yang ada, yang sering kali



menghambat proses penegakan hukum. Keterlambatan dalam pembaruan undang-undang untuk mengatasi kejahatan digital menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini, sehingga pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah tersebut untuk menghindari sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini tidak cukup responsif terhadap dinamika kejahatan yang terus berkembang, sehingga diperlukan upaya yang lebih proaktif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Keterbatasan regulasi ini juga berkontribusi pada kesulitan dalam membuktikan tindak pidana ekonomi yang dilakukan secara digital. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pedoman yang jelas mengenai bagaimana bukti digital harus dikumpulkan dan disajikan. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, pengadilan harus mempertimbangkan bukti yang ada dengan hati-hati, mengingat kompleksitas dan sifat dinamis dari kejahatan digital. Misalnya, dalam kasus yang ditangani, pengadilan harus mengevaluasi keabsahan bukti yang diperoleh dari platform digital dan memastikan bahwa proses pengumpulan bukti tersebut tidak melanggar hak-hak pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbarui dan memperkuat regulasi yang ada agar dapat memberikan landasan hukum yang lebih solid bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital, serta memberikan kejelasan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Selain keterbatasan regulasi, sumber daya manusia dan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi tantangan signifikan dalam menangani tindak pidana ekonomi digital. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pelatihan yang memadai mengenai teknologi digital dan modus operandi kejahatan yang berkembang. Keterbatasan pengetahuan ini mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyelidiki kasus-kasus kejahatan digital secara efektif. Dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan harus mempertimbangkan latar belakang dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang kompleks, yang sering kali melibatkan teknologi canggih. Misalnya, dalam kasus yang ditangani, pengadilan harus mengevaluasi apakah aparat penegak hukum memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami bukti digital yang disajikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada, serta memahami cara-cara baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya (Asaad Dkk, 2023).

Kurangnya sumber daya dan alat yang memadai untuk investigasi kejahatan digital juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak lembaga penegak hukum di Indonesia yang masih menggunakan metode tradisional dalam penyelidikan, yang tidak selalu efektif dalam menghadapi kejahatan yang dilakukan secara online. Misalnya, alat untuk melacak transaksi digital dan menganalisis data sering kali tidak tersedia atau tidak memadai. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, hal ini dapat mempengaruhi kualitas penyelidikan dan hasil akhir dari proses hukum. Ketidakmampuan untuk mengakses teknologi yang diperlukan untuk menyelidiki kejahatan digital dapat mengakibatkan hilangnya bukti penting dan menghambat proses penuntutan. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi dan alat yang diperlukan untuk investigasi kejahatan digital sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Lembaga penegak hukum perlu mendapatkan dukungan dalam bentuk anggaran dan sumber daya untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks.



Kerjasama antar lembaga dan internasional juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting dalam penanganan tindak pidana ekonomi di era digital. Di dalam negeri, sering kali terdapat kesulitan dalam koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan. Dalam putusan Mahkamah Agung, pengadilan harus mempertimbangkan bagaimana kerjasama antar lembaga dapat diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus yang ditangani, pengadilan dapat merekomendasikan pembentukan tim gabungan yang melibatkan berbagai lembaga untuk menangani kasus-kasus kejahatan ekonomi secara lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara lembaga-lembaga ini agar dapat bekerja sama secara efektif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ekonomi, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses penegakan hukum.

Di tingkat internasional, tantangan dalam menjalin kerjasama untuk menangani kejahatan lintas negara juga menjadi hambatan yang signifikan. Tindak pidana ekonomi sering kali melibatkan pelaku dari berbagai negara, sehingga memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum di berbagai yurisdiksi. Namun, perbedaan dalam sistem hukum, regulasi, dan prosedur penegakan hukum antar negara dapat menyulitkan proses kerjasama ini. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan bagaimana kerjasama internasional dapat diperkuat untuk mengatasi kejahatan yang bersifat lintas batas. Hal ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan pengembangan mekanisme hukum yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih mudah dalam melacak dan menangkap pelaku kejahatan yang beroperasi di luar negeri.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana ekonomi di era digital sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, dan kerjasama antar lembaga menjadi faktor-faktor yang saling terkait dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan harus mempertimbangkan semua aspek ini dalam proses penegakan hukum, agar dapat memberikan keadilan yang seimbang dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan terlindungi dari tindak pidana ekonomi (Baza Dkk, 2023).

### **Solusi Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Di Era Digital**

Salah satu solusi utama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital adalah dengan melakukan peningkatan regulasi dan kebijakan yang ada. Regulasi yang ada saat ini sering kali tidak cukup responsif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk



memperbarui dan memperkuat regulasi yang mengatur tindak pidana ekonomi, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pid.Sus/2021, pengadilan menunjukkan pentingnya adanya landasan hukum yang jelas untuk menuntut pelaku kejahatan digital. Dengan memperbarui regulasi, diharapkan aparat penegak hukum dapat memiliki pedoman yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi digital, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, regulasi yang lebih ketat juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, sehingga mereka berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan ilegal.

Pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kebijakan yang ada harus mampu mengantisipasi dan merespons perubahan yang cepat dalam dunia digital, termasuk munculnya teknologi baru yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Misalnya, kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi blockchain dan cryptocurrency perlu diperhatikan, mengingat potensi penyalahgunaannya dalam tindak pidana ekonomi. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, pengadilan harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan yang lebih baik dapat membantu dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya kebijakan yang adaptif, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi. Selain itu, pengembangan kebijakan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Selain peningkatan regulasi dan kebijakan, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga merupakan solusi yang sangat penting. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kejahatan digital. Oleh karena itu, program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi digital dan modus operandi kejahatan yang berkembang. Dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan harus mempertimbangkan latar belakang dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang kompleks. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan ekonomi di era digital. Pelatihan ini juga harus mencakup simulasi kasus nyata dan penggunaan alat-alat investigasi modern, sehingga aparat penegak hukum dapat langsung menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam situasi yang sebenarnya.

Pengadaan alat dan teknologi yang diperlukan untuk investigasi kejahatan digital juga menjadi bagian penting dari solusi ini. Banyak lembaga penegak hukum di Indonesia yang masih menggunakan metode tradisional dalam penyelidikan, yang tidak selalu efektif dalam menghadapi kejahatan yang dilakukan secara online. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi yang diperlukan untuk melacak transaksi digital, menganalisis data, dan mengumpulkan bukti digital sangat penting. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, pengadilan harus mempertimbangkan bagaimana ketersediaan alat dan teknologi dapat mempengaruhi kualitas penyelidikan dan hasil akhir dari proses hukum. Dengan menyediakan sumber daya yang memadai, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas



penegakan hukum. Selain itu, pengadaan alat yang tepat juga akan mempercepat proses investigasi, sehingga kasus-kasus kejahatan ekonomi dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien.

Membangun kerjasama yang kuat antar lembaga penegak hukum di dalam negeri juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kerjasama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses penegakan hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan harus mempertimbangkan bagaimana kerjasama antar lembaga dapat diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penegakan hukum. Strategi untuk meningkatkan kerjasama ini dapat mencakup pembentukan tim gabungan yang melibatkan berbagai lembaga untuk menangani kasus-kasus kejahatan ekonomi secara lebih efektif. Dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara lembaga-lembaga ini, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terkoordinasi. Selain itu, kerjasama ini juga dapat menciptakan sinergi dalam penggunaan sumber daya dan informasi, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efisien (Gultom Dkk, 2023).

Di tingkat internasional, inisiatif untuk menjalin kerjasama dalam penanganan tindak pidana ekonomi juga sangat penting. Tindak pidana ekonomi sering kali melibatkan pelaku dari berbagai negara, sehingga memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan bagaimana kerjasama internasional dapat diperkuat untuk mengatasi kejahatan yang bersifat lintas batas. Hal ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan pengembangan mekanisme hukum yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih mudah dalam melacak dan menangkap pelaku kejahatan yang beroperasi di luar negeri. Kerjasama internasional juga dapat membantu dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi.

Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam upaya memerangi tindak pidana ekonomi digital. Masyarakat yang lebih sadar akan risiko dan modus operandi kejahatan digital akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Oleh karena itu, program-program edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, komunitas, dan media, harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewaspadaan terhadap tindak pidana ekonomi. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung, pengadilan dapat mendorong inisiatif edukasi sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi diri mereka dari potensi kerugian. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan mereka dapat mengenali tanda-tanda penipuan dan melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwenang. Kampanye edukasi ini juga dapat mencakup informasi tentang cara melindungi data pribadi dan menghindari penipuan online.

Secara keseluruhan, solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan regulasi dan kebijakan, pelatihan aparat penegak hukum, hingga kerjasama antar lembaga dan edukasi masyarakat. Dalam putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa pengadilan harus mempertimbangkan semua aspek ini dalam proses penegakan hukum, agar dapat memberikan



keadilan yang seimbang dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara komprehensif, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan terlindungi dari tindak pidana ekonomi. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga dan kejahatan ekonomi dapat diminimalisir.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mengingat kompleksitas dan dinamika yang terus berkembang dalam dunia digital. Tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan regulasi yang ada, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak dari kejahatan ekonomi, harus diatasi melalui peningkatan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi digital. Program edukasi masyarakat juga harus menjadi prioritas, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan yang mungkin mereka hadapi. Kerjasama antar lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan saling mendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana ekonomi. Diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan terlindungi dari tindak pidana ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rayhan, H.E. Rakhmat Jazuli, Essa Alicia Pradita, and Hafizah Sukma Yuniar, "Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Ranah Pemeriksaan Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 279–295. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.119>.
- Aldi Akbar, Aditya Wardhana, and Budi Rustandi Kartawinata, "Keuangan Digital: Dibalik Kemudahannya, Waspada Pula Potensi Kejahatannya Seri Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Guru & Orang Tua Siswa TK Taman Indria Bandung)," *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 293–300. <https://doi.org/10.37081/adam.v3i2.1960>.
- Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, and Aminuddin Ilmar, "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 260–271.
- Gita Ayu Ajeng Septianingrum, None Putri Nabila, and None Siti Nurhayati, "Teknologi dan Kepatuhan Hukum (Tantangan dan Strategi dalam Sosiologi Hukum)," *Jurnal Humaya:*



Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat Dan Budaya 4, no. 1 (July 17, 2024): 47–62.  
<https://doi.org/10.33830/humaya.v4i1.8156>.

Ilham Jeryawan, “Analisis Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Alat Bukti Elektronik Di Pengadilan,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2024): 71–80.  
<https://doi.org/10.3783/causa.v5i2.4093>.

Martinus Filemon Gultom, Leonardo Simanjuntak, Ayu Efrita Dewi, and Heni Widiyani, “Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government),” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 33–42.  
<https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.273>.

Moch. Ravy Mauludy Baza and Moh Agil, “Peran Penting Teknologi Digital Blockchain Dalam Upaya Mengurangi Kasus Korupsi Penggelapan Surat Berharga,” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (February 14, 2023): 43–54. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1>.

Valencia Prasetyo Ningrum and Yuliya Safitri, “Sistem Pembuktian Elektronik Pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,” *Comserva* 2, no. 08 (2022): 1357–67.  
<https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.475>.